

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099246/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 09 Januari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
- 4. Kode/Nama Satker : (099246) PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
- Sebesar : Rp. 236.932.000 (DUA RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 236.932.000
Rp. 236.932.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 236.932.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PALANGKARAYA (043) Rp. 236.932.000

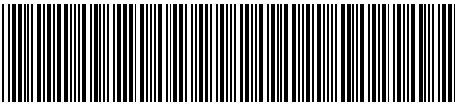
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099246/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4697-5218-0965-0986

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
Kode>Nama Satker : (099246) PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

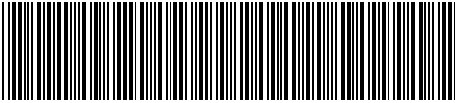
Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			236.932.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			236.932.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA Koordinasi	3,00	kegiatan	13.620.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	3,00	kegiatan	13.620.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA Perkara Hukum Perseorangan	501,00	Perkara, Berkas Perkara	179.312.000
Rincian Output	:	01	BCA.U08 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	433,00	Perkara	119.687.000
		02	BCA.U09 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	54,00	Perkara	43.260.000
		03	BCA.U10 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	14,00	Perkara	16.365.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	240,00	Orang	44.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	240,00	Orang	44.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099246/2025
I B. SUMBER DANA



DS:4697-5218-0965-0986

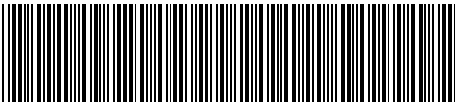
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
Kode>Nama Satker : (099246) PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	236.932.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	236.932.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099246/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4697-5218-0965-0986

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
Kode>Nama Satker : (099246) PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
Kewenangan : (KD)

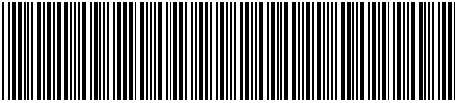
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7		9	10
099246	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	-	236.932	-	-	-	236.932		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	236.932	-	-	-	236.932		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	236.932	-	-	-	236.932		
1049.AEA	Koordinasi (14.51 KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA)	-	13.620	-	-	-	13.620	14 . 51	
01	RM	-	13.620	-	-	-	13.620	043@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (14.51 KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA)	-	179.312	-	-	-	179.312	14 . 51	
01	RM	-	179.312	-	-	-	179.312	043@	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (14.51 KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA)	-	44.000	-	-	-	44.000	14 . 51	
01	RM	-	44.000	-	-	-	44.000	043	
JUMLAH		-	236.932	-	-	-	236.932		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099246/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4697-5218-0965-0986

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
Kode>Nama Satker : (099246) PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

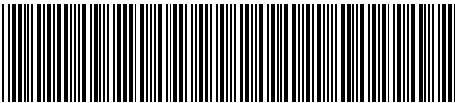
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099246 005.03.BF.1049	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	19.142	18.426	21.456	18.426	21.456	19.359	18.610	21.640	18.610	21.640	18.610	19.559	236.932
		BELANJA BARANG	19.142	18.426	21.456	18.426	21.456	19.359	18.610	21.640	18.610	21.640	18.610	19.559	236.932
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	19.142	18.426	21.456	18.426	21.456	19.359	18.610	21.640	18.610	21.640	18.610	19.559	236.932
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	19.142	18.426	21.456	18.426	21.456	19.359	18.610	21.640	18.610	21.640	18.610	19.559	236.932
		PERKIRAAN PENERIMAAN	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	8.018	96.007
		- PNBP (425231)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	13	90
		- PNBP (425232)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	6.240
		- PNBP (425233)	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.429	17.060
		- PNBP (425239)	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.056	72.617

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099246/2025
IV A. B L O K I R



DS:4697-5218-0965-0986

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [14] KALIMANTAN TENGAH
Kode dan Nama Satker : [099246] PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

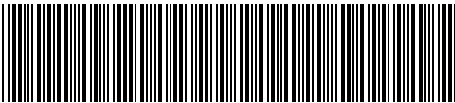
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
099246	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 16.048 52 Belanja Barang Rp. 16.048		
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.AEA	Koordinasi 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.060 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 750 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.238 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099246/2025
IV B. C A T A T A N



DS:4697-5218-0965-0986

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [14] KALIMANTAN TENGAH
Kode dan Nama Satker : [099246] PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002